REPUTASI
Volume 2 Issue 2, October 2021: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nada Okta Anugrah
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
e-mail : nadaanugrah17@gmail.com

Enny Hardi
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Sustinah Limarjani
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

To find out and analyze PBBKB receipts in Central Kalimantan Province for the 2018 to 2020 fiscal year and the development of contributions by 2018 to 2020 regional budget revenues are the objectives of this study. The results of this study indicate that the percentage in 2018 shows the highest percentage compared to 2018 to 2020 and the smallest contribution percentage is in 2020. The percentage of contributions given is not the same as the nominal PBBKB revenue and regional income in budget recording and final realization. year.

Keywords: PPKB, Contribution, Revenue

ABSTRAK

Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan PBBKB di Prov.Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 hingga 2020 dan perkembangan kontribusi oleh penghasilan daerah anggaran 2018 hingga 2020 merupakan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase tahun 2018 menunjukan jumlah presentase tertinggi dibandingkan dari tahun 2018 s/d 2020 dan presentase kontribusi yang paling kecil yaitu pada tahun 2020. Presentase kontribusi yang diberikan tidak sama dengan nominal penerimaan PBBKB dan pendapatan daerah dalam pencatatan anggaran dan realisasi akhir tahun.

Kata Kunci : PPKB, Kontribusi, Penerimaan

PENDAHULUAN

Semua jenis BB cair/gas yang digunakan buat kendaraan bermotor merupakan PBBKB. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 19 Undangundang Nomor 28 Tahun 2009). PBBKB di pemerintahan Prov.Kalsel diatur dalam Peraturan Daerah Prov.Kalteng No. 07 Tahun 2010 Tentang PBBKB. Dalam Pasal 26 perda tersebut dikatakan bahwa Objek PBBKB yaitu bahan BKB yang disediakan/ dianggap dipakai untuk KB, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. PBBKB cukup potensial untuk merubah pertambahan PAD Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan setiap tahunnya semakin bertambahnya pengguna kendaraan dan mesin-mesin pabrik yang menggunakan bahan bakar.

Tahun	Realisasi PBBKB (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase(%)
2018	573.993.267.665	4.678.769.958.720	12,26
2019	551.253.815.311	4.990.195.455.015	11,04
2020	417.170.636.647	4.750.038.014.730	8,78

sumber : Data Diolah Kembali (2021)

Dilihat diatas, bisa disimpulkan realisasi PBBKB memiliki peranan yang besar terhadap PD akan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga sangat perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah provinsi agar tahun berikutnya tidak semakin merosot. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan PBBKB diantaranya adalah penimbunan Bahan Bakar Minyak oleh oknum tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas, Maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikan judul tugas akhir, yaitu "ANALISIS PENERIMAAN PBBKB dan KONTRIBUSI NYA TERHADAP BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH "

HASIL PENELITIAN

1. Target Dan Hasil Pendapatan PBBKB Provinsi Kalimantan Tengah (2018-2020)

Berikut ini data penghasilan PBBKB berdasarkan laporan hasil anggaran untuk tahun yang berakhir, dari tahun 2018 s/d 2020:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Presentasi (%)
2018	**395.186.464.058**	**573.993.267.665**	**178.806.803.607**	**145,23**
2019	**567.775.379.809**	**551.253.815.311**	**(16.521.564.498)**	**97,09**
2020	**400.390.000.000**	**417.170.636.647**	**16.780.636.647**	**104,19**

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBBKB menunjukan bahwa realisasi PBBKB mencapai target yang telah di tetapkan. Menurut kepala sub bagian pajak daerah, hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat terhadap Bahan Bakar Motor yang cukup signifikan, Per Oktober 2018, Pertamina Region Kalimantan mencatat konsumsi bahan bakar minyak subsidi jenis Premium berada di bawah kuota yang ditetapkan BPH Migas. Adapun, realisasi penyaluran Premium adalah 934 ribu kiloliter atau 15% di bawah kuta sebanyak 1,097 juta kiloliter. Sehingga membuat penerimaan pemerintah paling besar pada tahun 2018 dibanding dari tahun 2019 dan 2020.
2. Analisa penerimaan PBBKB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 menunjukan bahwa realisasi PBBKB tidak mencapai target. Dikarenakan oleh adanya pengurangan harga jual BBKB pada tahun tersebut. Namun target yang ditetapkan pada tahun 2019 jauh lebih besar dari pada tahun sebelumnya.
3. Analisa penerimaan PBBKB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 menunjukan bahwa realisasi PBBKB kembali menggapai target yang sudah ditentukan. Disebabkan oleh harga jual minyak tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, masih tetap seperti tahun 2019 karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sebab lain yaitu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akurasi data para Wajib Pajak

(WP) sebagai subjek pajak, baik itu berupa badan maupun orang pribadi sebagai pengguna BBKB. Setelah harga bk yang stabil dan penerimaan daerah yang meningkat, pemerintah harus berfokus untuk melakukan hubungan baik antara Badan Keuangan Daerah dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai pemungut PBBKB yang juga harus dibina agar pungutan dapat lebih intensif. Pemerintah sadar tentang pentingnya memperketat pengawasan peredaran BBM bersubsidi jenis solar agar tidak ditumpuk oleh spekulan untuk dijual kembali kepada industri yang memerlukan untuk produksi ataupun transportasi.

Harga bahan bakar minyak dan gas sangat berpengaruh terhadap penerimaan PBBKB. peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan PBBKB, dengan samakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang memerlukan bahan bakar untuk menjalankannya. Hal ini bisa membuat permintaan subjek pajak akan penggunaan bahan bakar minyak meningkat.Beberapa hal yang menjadi faktor naik dan turunnya penerimaan PBBKB, jugaberimbas terhadap naik dan turunnya Pendapatan Daerah. Sebab kekayaan potensial bagi negara Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Tengah merupakan minyak Bumi, yang industri tambang dan perkebunannya sedang berkembang.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2018-2020)

3. Berdasarkan table di atas, Pendapatan Daerah dapat dianalisa sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Presentasi (%)
2018	**4.414.621.286.137**	**4.678.769.958.720**	**264.148.672.583**	**105,98**
2019	**4.959.931.295.330**	**4.990.195.455.015**	**30.264.159.685**	**100,61**
2020	**4.816.639.952.634**	**4.750.038.014.730**	**(66.601.937.904)**	**98,62**

1. Analisa Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 menunjukan bahwa realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai target yang ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya PAD, dana perimbangan, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

4. Analisa Pendapatan Daerah di Provinsi Kaliantan Tengah tahun 2019 menunjukan bahwa realisasi PD telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini diperoleh dari berbagai sektor, mulai dari retribusi daerah, pajak daerah, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun penghasilan lainnya yang sah.

5. Analisa Pendapatan Daerah di Provinsi Kaliantan Tengah tahun 2020 menunjukan bahwa Penghasilan Daerah tidak mencapai target yang di tentukan. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2020 pandemik masuk ke Indonesia khususnya Kalimantan Tengah sehingga aktivitas terdampak dan royalti juga berdampak.

3. Kontribusi PBBKB Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam penelitian ini akan menghasilkan berapa presentase kontribusi yang diberikan oleh PBBKB oleh penghasilan daerah di Prov. Kalimantan Tengah pada tahun 2018 s/d 2020. Kontribusi dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun	Realisasi PBBKB (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase (%)
2018	573.993.267.665	4.678.769.958.720	12,26
2019	551.253.815.311	4.990.195.455.015	11,04
2020	417.170.636.647	4.750.038.014.730	8,78

Sumber: Data diolah kembali (2021)

Berdasarkan table di atas, kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2018 kontribusi yang terealisasi sebesar 12,26%. Hal ini menunjukan bahwa PBBKB memberikan kontribusi kurang dari $^{1}/_{8}$ dari total keseluruhan Pendapatan Daerah yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 87,74% didapat hasil peranan pendapatan pajak lainnya contohnya PKB dan BBNKB. Pada tahun ini kontribusi yang diberikan PBBKB cukup signifikan untuk penerimaan PBBKB yang mencapai target dan menjadi realisasi terbesar diantara tahun 2018 sampai dengan 2020.

2. Pada Tahun 2019 kontribusi yang terealisasi sebesar 11, 04%. Kontribusi yang diberikan menurun dari tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan karena target dan realisasi penerimaan PBBKB turun, sehingga mempengaruhi presentase kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Hal yang membuat pemerintah menurunkan target dari penerimaan PBBKB dikarenakan Kemenkeu yang meluncurkan paket kebijakan penurunan sejumlah bahan bakar minyak (BBM). Dengan tujuan agar realisasi yang diterima tetap mencapai apa yang sudah ditargetkan dan melihat dari keadaan yang menyatakan bahwa harga BBM sedang turun, maka pemerintah menurunkan target penerimaan tersebutdan membuat kontribusi yang diberikan juga menurun.
3. Pada Tahun 2020 kontribusi yang terealisasi sebesar 9,62%. Kontribusi yang diberikan mengalami penururnan yang signifikan disebabkan adanya pengurangan harga jual BBKB dan gas pada tahun 2019. Oleh karna itu, berimbas pada penghasilan PBBKB yang juga mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat terhambat. Pada tahun 2020 ini adalah kontribusi terendah yang diberikan dikarenakan nominal dari target pada tahun 2020 turun begitu pula dengan realisasi penerimaannya.

KESIMPULAN

1. Sumber pendapatan penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ada beberapa, salah satunya pajak daerah. Dalam PD terbagi atas dua, yaitu prov dan kab/kota. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan bagian dari pajak provinsi yang pengelolaannya ditetapkan untuk PBBKB di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 5 persen untuk bahan bakar subsidi dan 7,5 persen untuk bahan bakar tidak subsidi.
2. Pada tahun 2018 PBBKB memberikan kontribusi sebesar 12,27%, presentase tahun 2018 menunjukan jumlah presentase tertinggi dibandingkan dari tahun 2018 s/d 2020.
3. Pada tahun 2019 PBBKB memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 11,04%. Kontribusi yang diberikan lebih kecil daripada tahun sebelumnya, sama halnya dengan apa yang tercatat dalam pencatatan anggaran dan realisasi penerimaan/pendapatan daerah dan penerimaan PBBKB mengalami penurunan pada tahun 2019. Pendapatan daerah maupun penerimaan PBBKB, keduanya lebih kecil dari apa yang sudah dianggarkan.
4. Pada tahun 2020 PBBKB memberikan kontribusi hanya sebesar 9,62% dibandingkan dengan tahun 2018 s/d 2020 presentase kontribusi yang diberikan paling kecil yaitu pada tahun 2020. Presentase kontribusi yang diberikan tidak sama dengan nominal penerimaan PBBKB dan pendapatan daerah dalam pencatatan anggaran dan realisasi akhir tahun. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah penimbun BBM yang mengambil bahan bakar bersubsidi di luar dari wilayah Kalimantan Tengah sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, menurut Muhammad Basrowi (2020) data jumlah kasus penimbunan BBM pada tahun 2020 yaitu lebih dari 3.000 Liter solar diselundupkan ke wilayah Kalimantan Tengah, hal lain yang menyebabkan turunnya kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pada awal tahun 2020 kasus pertama Covid-19 masuk ke Indonesia, sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berimbas pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

AuliaSeptianur.A. (2020). Analisis penerimaan PBBKB terhadap pajak daerah provinsi banjarmasin. *2014-2018*, pp. 1-73.adanPendapatanDaerah. (2020). *pajak bahan bakar kenderaan bermotor*. From bapenda.jabarprov.go.id: https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor/#tab-id-2

BustamarAyza. (2020, mei 6). *Perkembangan jumlah kenderaan bermotor*. From bps.go.id: https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/02/09/1133/perkembangan -jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-1949-2018.html

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Primandita Fitriandi, dkk. 2018. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap.* Jakarta : Salemba Empat

Redaksi2. (2020, januari 3). *Kepala Bapenda Kalteng Kaspinor, Target 2020 Harus Meningkat Lagi*. From sekilasmedia.com: https://sekilasmedia.com/2020/01/03/kepala-bapenda-kalteng-kaspinor-target-2020-harus-meningkat-lagi/